

Merdeka

Reformasi Total untuk Rakyat

JAKARTA Rp 1.400,-

07

▲ Ketua DKP Jenderal Subagyo HS:

"Prabowo Menculik Sembilan Aktivis"

PANGLIMA ABRI/Menhankam Jenderal Wiranto mengumumkan sanksi administratif yang dijatuhkannya terhadap Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR, dan Kol Inf Chairawan, dalam kasus penculikan aktivis.

Pengumuman ini disampaikan Pangab di Ruang Urip Sumohardjo, Mabes ABRI Jalan Merdeka Barat, didampingi Ketua DKP (Dewan Kehormatan Perwira) Jenderal Subagyo HS dan seluruh anggota, Senin pukul 13.30 WIB, kemarin.

Sanksi tersebut ialah sebagai berikut:

* Letjen Prabowo Subianto, **diakhiri masa dinas dari ABRI terhitung sejak Senin kemarin. Kini status Prabowo sipil, memperoleh pensiun karena dia diberhentikan dengan hormat.**

* Mayjen Muchdi PR, **dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural ABRI. Dia masih ABRI aktif, tanpa jabatan.**

* Kolonel Inf Chairawan, **Dibebaskan dari tugas dan jabatan struktural ABRI. Dia masih ABRI aktif, tanpa jabatan.**

Tanpa Tekanan

Dalam penjelasannya, Pangab mengatakan bahwa keputusan dan sanksi tersebut diambil tanpa ada tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun.

Sanksi itu bersifat administratif. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk **dilanjutkan ke Mahkamah Militer** jika dalam proses persidangan Mahkamah Militer (Mahmil) atas 10 anggota (Kopassus, red) diperiksa, ada bukti keterlibatan Prabowo, Muchdi, dan Chairawan.

Sementara itu Ketua DKP Jenderal Subagyo mengungkapkan ada 9 orang aktivis yang diakui oleh Prabowo Subianto telah diculik. Namun para aktivis tersebut telah bebas dan masih hidup. Kasad tidak mau menyebutkan siapa nama para aktivis tersebut.

Berdasarkan catatan *Merdeka*, sembilan orang aktivis yang menjadi korban penculikan dan sudah kembali adalah:

Pius Lustrilang, Desmond J Mahesa, Haryanto Taslam, Faisal Reza, Rahardjo Waluyo Djati, Nezar Patria, Mugianto, Aan Rusdiyanto, dan Andi Arief. (PN)

Jadi, Apa Kesalahan Prabowo

APA komentar para sesepuh dan senior ABRI mengenai pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari dinas ABRI karena keterlibatannya dalam kasus penculikan sejumlah aktivis.

Terhadap masalah ini Barisan Nasional menyatakan, keputusan DKP terkesan masih setengah-setengah karena sanksi yang diberikan kepada Prabowo hanyalah pemberhentian dari dinas aktif ABRI, bukan pemecatan.

"Bagaimana ya, keputusannya dia dipecat atau dipensiunkan, ini menjadi pertanyaan Barisan Nasional. Diberhentikan dengan dipecat itu berbeda, kalau salah, ya dipecat saja. *Kok* malah dipensiunkan. Kalau diberhentikan (dipensiunkan-red) bisa diberhentikan dengan hormat. Ini kan seolah-olah dia dipensiunkan dengan hormat," kata juru bicara Barisan Nasional Letjen (Purn) Kemal Idris kepada *Merdeka* di Jakarta, tadi malam.

Sesepuh ABRI lainnya Letjen (Pur) M Jassin menyatakan heran. Sesepuh ABRI lainnya Letjen (Pur) M Jassin menyatakan heran.

Sesepuh ABRI lainnya Letjen (Pur) M Jassin menyatakan heran. Sesepuh ABRI lainnya Letjen (Pur) M Jassin menyatakan heran.

Korban Kebiadaban di Aceh Pantauan Komnas HAM

Jakarta, Selasa, Merdeka

Tim Komnas HAM yang melakukan pemantauan terhadap kasus pelanggaran HAM selama diberlakukannya DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh, yang kembali hari Minggu (22/8), membawa "ole-ole" mengenaskan. Tim yang terdiri dari Sekjen Komnas Baharuddin Lopa, Koesparmono Irsan, M Salim dan Soegiri ini membawa data soal tindak kekerasan/kebiadaban di Aceh sejak tahun 1989 hingga Agustus 1998.

Hasil pantauan itu mereka ungkapkan kepada pers, di Jakarta, kemarin. Menurut Baharuddin Lopa, selama melakukan peninjauan di lokasi kejadian (20-22/8), Tim Komnas menemukan beberapa modus tindak kebiadaban dengan puluhan ribu korban. Hasil pantauan itu mereka ungkapkan kepada pers, di Jakarta, kemarin. Menurut Baharuddin Lopa, selama melakukan peninjauan di lokasi kejadian (20-22/8), Tim Komnas menemukan beberapa modus tindak kebiadaban dengan puluhan ribu korban. Hasil pantauan itu mereka ungkapkan kepada pers, di Jakarta, kemarin. Menurut Baharuddin Lopa, selama melakukan peninjauan di lokasi kejadian (20-22/8), Tim Komnas menemukan beberapa modus tindak kebiadaban dengan puluhan ribu korban.

"Tetapi ini baru data sementara yang kami dapatkan selama kami di sana. Masih ada kemungkinan akan muncul data-data baru lainnya yang akan memperkaya temuan-temuan ini," kata Lopa yang didampingi oleh anggota Komnas HAM Bambang W Soeharto di samping tiga anggota lainnya.

Disebutkan pula, terdapat sembilan kuburan massal yang ada di wilayah Aceh, hal tersebut berdasarkan catatan dari Forum LSM Aceh dan juga data-data dari berbagai pihak seperti masyarakat Aceh itu sendiri. "Tetapi itu belum termasuk kuburan perorangan yang banyak bertebaran di berbagai desa," tegasnya.

Menurut Lopa, selama mereka meninjau lokasi di Aceh, ada lima kuburan massal yang telah dibongkar oleh masyarakat atas prakarsa dan kesaksian Tim Komnas HAM.

"Kami melakukan pembongkaran kuburan mulai tanggal 21 Agustus hingga tanggal 22 Agustus. Dengan disaksikan oleh ketua Presidium Forum LSM, Ir Abdul Gani Nurdin, aparat kepolisian, anggota-anggota marinir wakil Pemda. Selain itu juga disaksikan oleh dokter Forensik Rumah Sakit Pirngadi, Polda Sumatera Utara, Polda Aceh dan dokter Puskesmas setempat seperti Kuala Tari dan Daya Tumama," jelasnya.

Kelima lokasi kuburan massal tersebut adalah Kuala Tari, Kembang Tanjung Kab Pidie yang ditemukan dua jenazah. Menurut masyarakat di tempat tersebut dikuburkan beberapa puluh jenazah dalam satu lubang. Pembongkaran dilakukan 21 Agustus, pukul 10.00 sampai 14.00 siang.

Rumah Geudong (tempat penahanan dan penganiayaan), Bill Arong, Kecamatan Gelumpang Tiga, Kab Pidie ditemukan sejumlah tulang-tulang jari tangan manusia yang terdiri dua jenazah, dikubur dalam satu lubang. Pembongkaran kuburan massal tersebut, pada 21 Agustus pukul 13.00 sampai 15.00 sore.

Sementara pada 22 Agustus pukul 17.30-19.00 di Bukit Sentang, kecamatan Lokhsukon kabupaten Aceh Utara, dalam satu lubang ditemukan 12 tulang paha, 5 tengkorak, 4 celana panjang, 2 celana dalam, 6 pasang tulang tangan yang masih terikat dalam tali rafia dan beberapa tulang lain yang berserakan.

Sesuai informasi dari masyarakat, terutama dari orang yang dipaksa untuk mengubur, dalam satu lubang biasanya ditempati

1. Meninggal akibat tindak kekerasan	781 orang
2. Hilang	163 orang
3. Dianiaya	368 orang
4. Janda	3.000 orang
5. Anak yatim	20.000 orang
6. Bangunan yang dibakar	102 buah
7. Pemerkoasaan	102 kasus/orang



Pantomim Anak Bangsa yang merefleksikan korban-korban berbagai tindak kekerasan di tanah air, digelar di Plaza Bapindo, Jakarta, kemarin.

(Bersambung ke halaman 8 kolom 1)